

## **DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI GAMPONG PEULEKUNG KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA**

**T. Sultan Iskandar Muda<sup>1</sup>, Fatimah<sup>2</sup>, Nazaruddin<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Pembangunan Sosial,<sup>3</sup>Matematika, Universitas Iskandar Muda

[sultan23072001@gmail.com](mailto:sultan23072001@gmail.com), [fatim03041995@gmail.com](mailto:fatim03041995@gmail.com), [nazarsimp8@gmail.com](mailto:nazarsimp8@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Research on the dynamics of community participation in infrastructure development in Peulekung Village will provide a deeper understanding of how economic, social, and political factors influence the level and character of community participation. Problem Formulation (1) How are the social factors of community participation in infrastructure development in Peulekung Village, Seunagan Timur District, Nagan Raya Regency? (2) How are the political factors of community participation in infrastructure development in Peulekung Village, Seunagan Timur District, Nagan Raya Regency?. By using a qualitative approach research method with a descriptive analytical research type. The results of this study indicate that community participation in infrastructure development in Peulekung Village is influenced by strong social networks, solidarity, trust in the village government, and transparency and accountability. These factors mutually support the creation of participatory, sustainable development that is in accordance with community needs. The suggestion of this research is to increase community participation in infrastructure development in Gampong Peulekung, it is recommended that the village government continue to strengthen the role of social organizations and local leadership, foster solidarity through collective activities, maintain public trust with transparency, and improve education and access to information about project supervision.*

**Keywords : Dynamics, Community Participation, Infrastructure Development**

### **ABSTRAK**

*Penelitian mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi tingkat dan karakter partisipasi masyarakat. Rumusan Masalah (1) Bagaimana faktor sosial partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya? (2) Bagaimana faktor politik partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung dipengaruhi oleh kuatnya jaringan sosial, solidaritas, kepercayaan terhadap pemerintah gampong, serta transparansi dan akuntabilitas. Faktor-faktor ini saling mendukung terciptanya pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saran penelitian ini adalah Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung, disarankan agar pemerintah gampong terus memperkuat peran organisasi sosial dan kepemimpinan lokal, menumbuhkan solidaritas melalui kegiatan kolektif, menjaga kepercayaan publik dengan transparansi, serta meningkatkan edukasi dan akses informasi tentang pengawasan proyek.*

**Kata Kunci : Dinamika, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur**

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Dalam mewujudkan pembangunan desa seperti yang dikehendaki oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari setiap kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga segenap aparat di semua lini birokrasi. Selain itu, potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Sebagai negara yang menganut asas desentralisasi, pemerintah negara Republik Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata

kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Selain itu, Undang-undang desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan Dana Desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan

yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa.

Melalui pemberian Dana Desa ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di pedesaan, memberi manfaat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui bantuan tersebut diharapkan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam program pembangunan. Bentuk pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia khususnya di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Gampong Peulekung, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, merupakan salah satu contoh dari banyaknya desa di Indonesia yang sedang mengalami proses pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun ekonomi lokal dan memperkuat infrastruktur dasar, partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini menjadi krusial. Partisipasi masyarakat tidak hanya mempengaruhi kesuksesan pembangunan fisik, tetapi juga mencerminkan keterlibatan dan pengaruh masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur memiliki implikasi yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Secara ekonomi, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap pasar, membuka peluang investasi, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dari segi sosial, pembangunan infrastruktur dapat memperkuat ikatan komunitas, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek-proyek publik, dan memperkuat solidaritas sosial di antara warga desa. Sementara itu, secara politik, partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan dapat memperkuat legitimasi pemerintah lokal dan memperluas ruang partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Namun demikian, meskipun pentingnya partisipasi masyarakat diakui secara luas, terdapat tantangan yang kompleks yang harus dihadapi. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuasaan, perbedaan pendapat, dan kendala ekonomi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan kualitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam konteks pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, strategi partisipatif yang efektif dapat membawa manfaat besar bagi semua pihak terlibat, menciptakan kondisi win-win di mana kepentingan masyarakat dan kebijakan pembangunan dapat saling mendukung.

Penelitian mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi tingkat dan karakter partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan memperhatikan konteks yang khas di Aceh, di mana proses rekonsiliasi pasca-konflik masih berlangsung, dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur juga dapat berperan dalam memperkuat perdamaian dan stabilitas sosial di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana dinamika partisipasi masyarakat di Gampong Peulekung dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam konteks serupa di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana faktor sosial partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung

Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?

2. Bagaimana faktor politik partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?

Merujuk dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui faktor sosial partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui faktor politik partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Konsep Partisipasi

Bornby dalam Theresia (2014: 196), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sementara itu, Adisasmita (2016: 34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Hal senada juga dikemukakan oleh Chandra (2013: 5) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang

telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Partisipasi memiliki arti yang penting dalam suatu pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan dalam suatu wilayah. Korten dalam (Supriatna, 2000) mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Asngari dalam Bahua (2018: 129) juga menyatakan bahwa suatu pelaksanaan partisipasi atau keterlibatan itu dilandasi pengertian bersama yang merupakan hasil dari komunikasi dan interaksi bersama dalam kelompok orang-orang yang terlibat dalam sebuah program. Slamet (2013: 41) mendefinisikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, serta masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengambil bagian dalam menikmati hasil pembangunan.

Rumusan FAO (*Food And Agriculture Organization*) yang dikutip Mikkelsen (2011: 53) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan

monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut (Sigalingging, 2014: 75).

Mubyarto dan Kartodirdjo (2018: 87) juga mengatakan bahwa partisipasi dalam program pembangunan pedesaan ialah kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri. Kesediaan masyarakat dalam berpartisipasi didorong oleh kemampuan pemerintah setempat dalam menyusun program apa yang dicanangkan yang mengarah kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Bila masyarakat bersedia membantu berpartisipasi pada program yang telah dicanangkan maka secara otomatis program pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/ proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Raharjo, 2016: 22). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud dari kesadaran serta tanggungjawab masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup serta kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak hanya menjadi suatu aktifitas ataupun kewajiban semata yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa melibatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

## 2. Teori Sumber Daya Manusia

Adapun pengertian dari pendapat ahli banyak pemahaman yang dituangkan dalam tulisan-tulisan sehingga sumber daya manusia sebagaimana Rivai (2013: 6) menyebutkan sebagai berikut: bahwa sumber daya manusia adalah seorang yang mau, siap dan mampu memberi kontribusi usaha dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau suatu perusahaan. Disamping itu sumber daya manusia juga adalah salah satu elemen masukan atau input yang sama halnya dengan unsur lainnya seperti bahan, modal, mesin, teknologi dan metode. Yang mana dengan input tersebut kemudian diubah menjadi proses manajemen yang setelah itu menjadi keluaran atau output berupa jasa atau barang dalam usaha mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

Sumber daya manusia memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Soeprihanto, (2012: 22) merupakan "suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan pegawai dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang pengetahuan umum dan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk peningkatan penguasaan teori pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan-persoalan organisasi".

Dalam kausalitas sumber daya manusia memiliki daya pikir selaku manusia sempurna yang diperoleh dari kemampuan kecerdasan, dibawanya sejak lahir, terpatrit dan dimiliki individual, sehingga menjadi modal awal dalam menentukan kualitas sumber daya. Sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha dengan cara belajar dan pelatihan dengan spesifikasi pengetahuan yang dimiliki seseorang, sebagaimana pendapat Salim dalam Suryono (2013: 8)

menyebutkan bahwa “Pengembangan sumber daya manusia mempunyai 2 (dua) sisi yakni “Kapabilitas manusia dan kemampuan menggunakan kapabilitas manusia, yang pada dasarnya pengembangan manusia tertuju pada peningkatan kualitas manusia itu sendiri”.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, begitu pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebenarnya. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Susilo dalam Ambar (2013: 3) Sumber daya manusia adalah “pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”. Sumber daya manusia di definisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan. Menurut David dalam Achmad (2016: 4) Sumber daya manusia merupakan “faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan”.

Tinggi rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga pembangunan antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan maupun kelompok. Permasalahan ini akan dapat diatasi apabila Sumber Daya Manusia (SDM) mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan atau kualitas lembaga pendidikan. Bahwasanya, pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas, Kartadinata (2015: 97) berpendapat bahwa “Pengembangan SDM berkualitas merupakan proses

kontekstual melalui pendidikan untuk menyiapkan manusia menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan dunia kerja agar mampu, mau, dan siap belajar sepanjang hayat”.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya dengan menempuh perbaikan di bidang pendidikan. Pendidikan harus mampu mengembangkan iklim belajar-mengajar yang dapat membantu untuk menciptakan individu-individu yang lebih baik, tumbuh dan berkembang lebih besar, lebih bijaksana, lebih perspektif, dan lebih kreatif dalam semua aspek kehidupannya.

### 3. Teori Organisasi

Sebuah Organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama. Definisi organisasi menurut Siagian (2014: 6) mengemukakan “organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat individu atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.”

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, organisasi menurut Manullang (2013: 59) mengemukakan “perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani *organon* dan

istilah latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap perisikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”.

Teori organisasi di bentuk untuk mencapai tujuan bersama yang didasari pada pendapat Fahmi (2016: 39) menyebutkan sebagai berikut “Organisasi adalah suatu kumpulan individu- individu yang berada dalam suatu lembaga maupun pemerintah, dimana dalam individu itu terdapat perbedaan satu sama lain dengan dimensi yang mencakup kultur, nilai-nilai, pendidikan, gender, status perkawinan, usia, pekerjaan dan sebagainya”. Dalam pencapaian tujuan bersama secara efektif di perlukan suatu manajemen yang baik, dan benar, dalam menggunakan sumber , maka cenderung masalah tersebut akan timbul kembali daya manajemen sangat penting dalam suatu organisasi, di mana di mencapai suatu pengembangan organisasi di perlu peran semua pihak dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam pekerjaan sehingga diperlukan koordinasi agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

Dengan demikian sebagaimana pendapat Robbins dalam Purwanto (2013: 1.3) menyebutkan bahwa “Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja secara terus menerus untuk mencapai suatu atau kelompok tujuan yang telah ditetapkan”. Organisasi merupakan alat manusia untuk mengorganisasi pekerjaan sehingga manusia tidak dapat mengabaikan keberadaan organisasi, karena ada individu yang bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan.

Suatu organisasi, baik itu organisasi formal maupun informal dalam melakukan segala aktivitas pastilah terdapat hubungan diantara orang-orang yang melaksanakan aktivitas tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin kompleks juga hubungan yang terjalin.

Mengatasi masalah itu, dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/bagian. Kemudian, pengertian organisasi juga disebutkan Weber dalam Silalahi (2011: 124) menyebutkan “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerjasama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.

Dalam pandangan secara organisatoris itu jelas bagi kita bahwa fenomenologis individu merupakan komunitas dengan organisasi merupakan perwujudan dari perbedaan-perbedaan alam pemikiran manusia yang dapat dipersepsikan oleh setiap orang dengan cara masing-masing, termasuk wujudnya sangat tergantung pada pengalaman dan jalan pikiran, maupun kebiasaan-kebiasaan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

Fahmi (2016: 3) menyebutkan bahwa “Organisasi garis menganut konsep yang bersifat Vertical, yaitu dimana setiap perintah, kebijakan, aturan dan petunjuk penugasan bersumber dari bawah”. Dengan perkembangan penerapan organisasi disamping pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintah daerah, pegawai negeri sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dengan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Menelusuri teori organisasi, paling tidak, kita dapat memulainya dari organisasi sebagai struktur hubungan kekuasaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu sistem administrasi. Atau sebagaimana definisi Weber dalam Santosa (2012: 2) menyebutkan bahwa “Birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi belaka penerapan birokrasi senantiasa dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai”. Pada dasarnya teori organisasi dikembangkan untuk memahami dan menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan dalam organisasi, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

Demikian pula organisasi garis dan staf sebagai suatu organisasi yang di bentuk dari penggabungan model garis dan staf dengan mempelajari beberapa kelemahan yang timbul pada kedua organisasi sebelumnya, sebagaimana di pendapat Faisal Affif dalam Fahmi (2016: 5) menyebutkan bahwa “Agar kesatuan perintah dapat di pertahankan, serta daya penanganan pimpinan dapat di perluas”.

Para pimpinan sering melihat organisasi sebagai tempat untuk memaksimalkan profit dan memberikan keuntungan kepada para pemegang saham namun sering mengenyampingkan atau mengindahkan permasalahan-permasalahan yang sering timbul dlam organisasi tersebut. Secara teoritis konsep dasar permasalahan (*base problema concept*) adalah jika tidak diselesaikan pada akarnya permasalahan, maka kecenderungan masalah tersebut akan timbul kembali, bahkan lebih jauh memiliki potensi menjadi bom waktu yang siap meledak pada saat seluruh masalah menyatu dan mengumpul sebagai satu masalah besar (*big problem*).

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Menurut Herdiansyah (2017: 9), metode penelitian kualitatif merupakan “Suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.

Sugiyono (2016: 13) metode deskriptif adalah “Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis, pendekatan kualitatif yang

menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Soetandyo, (2012: 65) “Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (*in depth*) dan total/menyeluruh (*holistic*).

Fokus penelitian mencakup dua aspek utama, yaitu: (1) Faktor sosial partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan (2) Faktor politik partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena keinginan peneliti untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai apa yang menjadi dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi Partisipatif, untuk memahami kondisi sosial dan pola perilaku masyarakat secara langsung.
2. Wawancara Mendalam, dilakukan terhadap informan utama seperti Keuchik, Tuha Peut, Kepala Dusun, dan warga.
3. Studi Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data sekunder seperti laporan desa, dokumen penyaluran bantuan, dan dokumen peraturan terkait.

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tiga langkah:

1. Reduksi Data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah.
2. Penyajian Data, dalam bentuk narasi dan kutipan hasil wawancara.
3. Penarikan Kesimpulan, dilakukan secara berkesinambungan sejak awal hingga akhir proses penelitian untuk menemukan pola, tema, dan makna yang mendalam.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor sosial partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**

#### **a. Jaringan Sosial**

Keterlibatan masyarakat dalam organisasi atau kelompok sosial memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi mereka dalam pembangunan infrastruktur. Organisasi lokal berfungsi sebagai penghubung sosial yang memperkuat partisipasi kolektif dan mempercepat komunikasi antar pihak. Hal ini menegaskan bahwa dimensi jaringan sosial, khususnya melalui keterlibatan dalam organisasi masyarakat, menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang partisipatif di Gampong Peulekung. Pemimpin masyarakat lokal berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pengaruh mereka bukan hanya secara struktural, tetapi juga bersifat emosional dan sosial. Kepemimpinan yang komunikatif, partisipatif, dan memberi teladan mampu membangkitkan kesadaran kolektif dan memperkuat jaringan sosial dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung.

Mubyarto dan Kartodirdjo (2018: 87) juga mengatakan bahwa partisipasi dalam program pembangunan pedesaan ialah kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri. Kesediaan masyarakat dalam berpartisipasi didorong oleh kemampuan pemerintah setempat dalam menyusun program apa yang dicanangkan yang mengarah kepada

kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Bila masyarakat bersedia membantu berpartisipasi pada program yang telah dicanangkan maka secara otomatis program pembangunan dapat berjalan dengan lancar. menurut Parwoto (2017: 52) beberapa keuntungan pembangunan partisipatif :

- a. pembangunan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya sehingga dengan alokasi yang relatif sama dapat mejangkau lebih luas
- b. pembangunan lebih menyentuh masyarakat
- c. masyarakat sadar dengan persoalan yang mereka hadapi dan potensi yang mereka miliki
- d. masyarakat lebih bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan
- e. masyarakat saling belajar dalam proses pembangunan dan rekan-rekan senasib
- f. tumbuhnya solidaritas
- g. tumbuhnya masyarakat mandiri, yang mampu mengambil keputusan-keputusan untuk menentukan masa depan mereka

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Raharjo, 2016: 22). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud dari

kesadaran serta tanggungjawab masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup serta kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak hanya menjadi suatu aktifitas ataupun kewajiban semata yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa melibatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

b. Solidaritas Sosial

Tingkat solidaritas dan kebersamaan di Gampong Peulekung berada pada tingkat yang cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Solidaritas yang terbangun melalui nilai-nilai gotong royong, saling membantu, dan kebersamaan memperkuat integrasi sosial dan menciptakan suasana kolektif yang kondusif untuk pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Solidaritas sosial memberikan dampak yang sangat positif terhadap motivasi partisipasi masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial tidak hanya memperkuat ikatan antarwarga, tetapi juga menjadi landasan kuat dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung. Solidaritas menjadi energi sosial yang menyatukan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Marjono dalam Salam (2010: 76) mengartikan bahwa partisipasi masyarakat pada hakekatnya adalah keterlibatan/keikutsertaan secara aktif dalam proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang diorganisir serta berlandaskan

kemampuan dan kemauan yang memadai, turut serta memutuskan tujuan dengan rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki. Isbandi (2017: 88) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Asngari dalam Bahua (2018: 129) juga menyatakan bahwa suatu pelaksanaan partisipasi atau keterlibatan itu dilandasi pengertian bersama yang merupakan hasil dari komunikasi dan interaksi bersama dalam kelompok orang-orang yang terlibat dalam sebuah program. Slamet (2013: 41) mendefinisikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, serta masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengambil bagian dalam menikmati hasil pembangunan.

Rumusan FAO (*Food And Agriculture Organization*) yang dikutip Mikkelsen (2011: 53) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan

keberadaan proyek tersebut (Sigalingging, 2014: 75).

## **2. Faktor politik partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**

### **a. Kepercayaan Terhadap Pemerintah Lokal**

Tingkat kepercayaan masyarakat Gampong Peulekung terhadap pemerintah gampong cukup tinggi dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan infrastruktur. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi, pelibatan warga, dan komunikasi yang efektif. Pemerintah gampong yang terbuka dan responsif mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan sukarela demi kemajuan gampong secara menyeluruh. Kebijakan pemerintah gampong yang bersifat transparan, adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan infrastruktur. Kebijakan yang inklusif dan komunikatif menciptakan rasa kepercayaan dan kepemilikan dari masyarakat terhadap proses pembangunan, yang pada akhirnya memperkuat keterlibatan mereka secara aktif demi kemajuan Gampong Peulekung.

Bornby dalam Theresia (2014: 196), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sementara itu, Adisasmita (2016: 34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi

kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Hal senada juga dikemukakan oleh Chandra (2013: 5) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Partisipasi memiliki arti yang penting dalam suatu pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan dalam suatu wilayah. Korten dalam (Supriatna, 2000) mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. karena hanya dengan partisipasi penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

### **b. Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dalam penggunaan dana publik di Gampong Peulekung

sudah berjalan cukup baik dan telah menjadi perhatian serius pemerintah gampong. Namun, masih diperlukan upaya peningkatan dalam hal cara penyampaian informasi agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara merata. Tingkat transparansi yang tinggi berpengaruh besar dalam mendorong partisipasi masyarakat, karena warga merasa dilibatkan, dihargai, dan percaya bahwa dana publik digunakan dengan benar demi kepentingan bersama. Gampong Peulekung telah memiliki mekanisme akuntabilitas dalam memonitor proyek pembangunan, baik melalui Tim Pelaksana Kegiatan, peran Tuha Peut, maupun keterlibatan masyarakat secara langsung. Namun, untuk meningkatkan efektivitas mekanisme ini, perlu penguatan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan cara melakukan pengawasan secara konstruktif, sehingga tercipta sistem pembangunan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif.

Sigalingging (2014: 72) kemudian menyimpulkan bahwa ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi, yaitu :

- 1) Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- 2) Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
- 3) Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab inimerupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Sastropetro (2018: 50) ada

beberapa poin penting dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan, yaitu: 1) partisipasi itu dilakukan melalui organisasi-organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan, 2) partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, 3) manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu memenuhi keinginan masyarakat setempat, 4) dalam proses partisipasi masyarakat menjamin adanya kontrol yang dilakukan masyarakat (Karianga, 2011: 23).

Michels (2016: 24) memetakan tiga fungsi demokrasi partisipatori, yakni : (1) merupakan fungsi pendidikan yang memberikan kontribusi pribadi kepada warga negara untuk memahami posisi dan perannya sebagai warga negara untuk menjadi warga negara yang berorientasi publik. (2) fungsi proses integrasi yang meningkatkan kesadaran warga bahwa mereka adalah bagian dari komunitas. Partisipasi adalah nilai kesadaran warga yang merasa sebagai salah satu komponen dalam sistem sosial dan bertanggungjawab untuk memberikan kontribusi. (3) fungsi untuk memastikan tata kelola publik yang baik. Partisipasi warga dalam proses politik pemeliharaan pemerintahan dilakukan secara akuntabel dan demokratis (Yani et al. 2017: 63).

## E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Peulekung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam organisasi sosial dan peran pemimpin lokal memperkuat

- partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Jaringan sosial yang terbentuk mendorong komunikasi efektif, kesadaran kolektif, serta kepemimpinan yang inspiratif, sehingga menciptakan partisipasi yang lebih aktif dan berkelanjutan di Gampong Peulekung.
2. Tingginya solidaritas di Gampong Peulekung, yang tercermin dari semangat gotong royong dan kebersamaan, memperkuat motivasi serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Nilai sosial ini menjadi kekuatan kolektif yang mendorong partisipasi aktif, menciptakan integrasi sosial, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
  3. Tingginya kepercayaan masyarakat Gampong Peulekung terhadap pemerintah gampong mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur. Kepercayaan ini tumbuh melalui transparansi, pelibatan warga, dan kebijakan inklusif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga memperkuat rasa memiliki dan komitmen bersama dalam memajukan gampong.
  4. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik di Gampong Peulekung cukup baik dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun, peningkatan penyampaian informasi dan edukasi tentang pengawasan masih diperlukan agar semua warga terlibat aktif. Mekanisme yang ada perlu diperkuat untuk menciptakan pembangunan yang lebih partisipatif dan bertanggung jawab.
- Edison, Emron., dkk. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta. Bandung
- Edy, Sutrisno. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Usman. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Griffin. (2013). *Perilaku Organisasi Manajemen*. Jakarta : Salmeha Empat.
- Gozali, Saydam. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Mikro*. Jakarta: Djambaran.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi). Jakarta : Bumi Aksara
- Handoko, Hani T. (2017). *Manajemen Persolina dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, Hani T. (2018). *Manajemen Persolina dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Herdiansyah, Haris. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. (2013). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ingham, G. (2012). *Size of Industrial Organization and Worker Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Iswanto, Yun. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan Nasional.
- John Suprihanto, dkk, (2015). *Perilaku Organisasional*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Jones, C. (2018). *Motivations for community participation in infrastructure development*. Journal of Development Studies, 54(5)
- Mangkunegara, A.P. (2012). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

#### Daftar Pustaka

Achmad, S. Ruky. (2015). *Sumber Daya Manusia Berkualitas*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

- Manullang. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press.
- Moleong, Lexy, J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riduwan. (2012). *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzaldan Ella Sagala. (2013). *Managemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PustakaSetia.
- Robbins, P.Stephen dan Timothy A. Judge. (2012). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2013). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, P Sondang. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekidjo, Notoatmdjo. (2013). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stoner, A.F. (2013). *Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Sunyoto. (2013) *Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Sumber Daya Manusia (praktik penelitian)*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE.
- Suwanto. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Torang, Dr.Syamsir. (2012). *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- T. Handoko, Hani. (2014). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta :BPFE-Yogyakarta.
- Wang, H. (2019). *Factors influencing community participation in infrastructure development*. Journal of Development Studies, 46(3).
- Wilson, Bangun. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.